

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) dalam buku teori akuntansi yang pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling menjelaskan hubungan kontraktual antara principal (pemegang saham) dan agent (manajemen), di mana principal memberikan wewenang kepada agent untuk mengelola perusahaan atas nama pemilik. Dalam hubungan tersebut sering terjadi konflik kepentingan karena masing-masing pihak berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri. Manajemen sebagai agent memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemegang saham sehingga menimbulkan asimetri informasi (*information asymmetry*) (Purba, 2023:23).

Hubungan agensi muncul pada saat satu atau lebih orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan layanan dan kemudian mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen, hubungan keagenan terjadi. Menurut Eisenhardt (1989) dalam (Jawak & Lubis, 2023) masalah antara prinsipal dengan agen muncul ketika terdapat suatu tujuan maupun keinginan dari

prinsipal ataupun agent yang bertentangan dan menjadi suatu hal yang mahal ataupun sulit bagi principal untuk melakukan konfirmasi mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh agent. Hal ini dikarenakan prinsipal tidak memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan posisi agen (Jawak & Lubis, 2023).

Menurut Boediono, (2005) dalam Jawak & Lubis, (2023) . Yang menjadi sebagai salah satu langkah yang cukup efisien dalam mengurangi timbulnya conflict of interest serta memastikan terwujudnya tujuan dari perusahaan ialah diperlukannya keberadaan aturan yang jelas serta adanya prosedur pengendalian yang efektif dalam mengarahkan kegiatan perusahaan. Selain itu diperlukan juga kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi aktivitas yang dapat mengarah pada kepentingan pribadi. *Good Corporate governance* dijadikan sebagai suatu mekanisme yang diharapkan dapat mengendalikan tindakan pihak manajemen yang digunakan oleh para *stakeholders* serta kreditor. Mekanisme pengawasan melalui dewan komisaris perlu diterapkan secara efektif untuk mengurangi konflik kepentingan (*agency conflict*) dan asimetri informasi antara manajemen sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal. Melalui fungsi pengawasan tersebut, dewan komisaris diharapkan mampu mendorong manajemen untuk menyampaikan informasi perusahaan secara lebih transparan, termasuk melalui pengungkapan *Sustainability Reporting* sebagai bentuk akuntabilitas kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

2.1.2 Teori Legitimasi (*Legitimasi Theory*)

Menurut Dowling & Pfeffer 1975 dalam Titisari (2020:55)

“ Legitimacy is a condition or a status which exists when an entity’s value system is congruent with the value system of the large social system of which the entity is a part”.

Teori legitimasi berhubungan erat dengan teori *stakeholder*, teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan secara keberlanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat ‘kontrak sosial’ antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya perusahaan melaksanakan operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan dimana mereka beroperasi (Titisari, 2020:57-59).

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan harus secara berkelanjutan menunjukkan telah beroperasi sesuai dengan norma-norma masyarakat. hal ini sering sekali dicapai melalui pengungkapan dalam laporan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan pengungkapan untuk mendemostrasikan perhatian manajemen akan nilai sosial, atau untuk mengarahkan kembali perhatian komunitas akan keberadaan

pengaruh negatif aktivitas perusahaan (Subroto & Endaryati, 2024:58) Dengan pengungkapan *sustainability reporting* menjadi bukti perusahaan bahwa perusahaan dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat diterima oleh masyarakat sehingga mendapatkan sinyal yang positif bagi masyarakat (Septi Ludianah et al., 2022).

2.1.3 Resource Based Theory

Resource Based Theory merupakan teori yang menjelaskan bagaimana perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Wernerfelt (1984) yang memandang perusahaan sebagai sekumpulan sumber daya produktif yang digunakan untuk menghasilkan kinerja dan keunggulan bersaing. Dalam *resource based theory*, kinerja perusahaan tidak hanya ditentukan oleh produk yang dihasilkan, tetapi juga oleh sumber daya yang dimiliki dan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya secara efektif. Barney (1991) menjelaskan bahwa sumber daya perusahaan meliputi seluruh aset, kapabilitas, proses organisasi, informasi serta pengetahuan yang dikendalikan perusahaan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya berwujud maupun tidak berwujud yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan (Ulum, 2017:23-24).

Dalam konteks perusahaan, salah satu sumber daya tidak berwujud yang memiliki peran penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif adalah yang terdiri dari *human capital*, *structural capital*, dan *relational capital*. Hal tersebut mencerminkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola informasi dan hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Perusahaan yang tinggi dalam aspek tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola pengetahuan, meningkatkan inovasi, serta menyusun strategi yang mendukung keberlanjutan perusahaan (Arifin et al., 2025).

2.1.4 Corporate Environmental Performance (Kinerja Lingkungan Perusahaan)

2.1.4.1 Pengertian Corporate Environmental Performance

Menurut Marwah & Amalina (2025) kinerja lingkungan perusahaan adalah sebagai berikut:

“kinerja lingkungan perusahaan didefinisikan sebagai sejauh mana suatu perusahaan mengelola dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya, termasuk pengelolaan limbah, efisiensi, penggunaan energi, dan pengurangan emisi karbon”.

Desriyunia & Machdar (2024) memaparkan bahwa *environmental performance* adalah sebagai berikut :

“*Environmental Performance* (kinerja lingkungan) menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menciptakan kondisi lingkungan yang sehat. Ini mencakup interaksi perusahaan dengan lingkungan, termasuk dampak dari penggunaan sumber daya, pengaruh proses organisasi terhadap lingkungan, kosekuensi lingkungan dari produk dan layanan, pemulihan produk yang telah diproses, serta kepatuhan terhadap peraturan mengenai lingkungan kerja”.

Menurut Suratno (2006) dalam Hermawan & Herawati (2021:1) pengertian kinerja lingkungan adalah sebagai berikut :

“Environmental Performance adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*). *Environmental performance* perusahaan diukur dari prestasi perusahaan mengikuti program PROPER yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi”.

2.1.4.2 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

Di Indonesia penilaian kinerja lingkungan perusahaan dibawah wewenang kementerian lingkungan hidup melalui program peringkat pengelolaan lingkungan pada perusahaan (PROPER). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, PROPER adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. PROPER bertujuan agar perusahaan patuh terhadap peraturan lingkungan hidup melalui integrasi prinsip pembangunan keberlanjutan dalam operasional bisnisnya, dengan penerapan manajemen lingkungan, penghematan energi, konservasi sumber daya dan penerapan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab kepada masyarakat (Ramadhana & Setiawan, 2024).

Environmental Performance ditentukan oleh peringkat perusahaan mengikuti PROPER. Salah satu inisiatif KLH adalah program ini, untuk tingkatan tata kelola

perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. PROPER secara berkala diungkapkan pada publik, yang memberikan penghargaan atau penalti kepada perusahaan berdasarkan tingkat kepatuhannya. Peringkat kinerja perusahaan melalui PROPER dikelompokkan dalam 5 (lima) peringkat warna. Masing-masing peringkat warna mencerminkan kinerja perusahaan. Warna tersebut terdiri dari :

Tabel 2. 1
Peringkat PROPER

No	Peringkat Warna	Definisi
1	Emas	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) baik di dalam proses produksi dan/atau jasa, dan juga melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat
2	Hijau	Untuk usahadan/atau kegiatan yang telah dilakukan melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisiensi melalui upaya 4R (dikurangi, digunakan lagi, didaur ulang dan pemulihan = <i>Reduce, Reuse, Recyle</i> dan <i>Recovery</i>), dan juga melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik.
3	Biru	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan yang di persyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Merah	Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan peryaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.
5	Hitam	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan

No	Peringkat Warna	Definisi
		perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berikut adalah penjelasan mengenai indikator peringkat kinerja yang digunakan dalam menilai kinerja lingkungan :

Tabel 2. 2
Indikator Emas

Aspek	Indikator
Pencemaran Air	1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air. 2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala 3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan 4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan <i>baseline</i> data.
Pencemaran udara/ energi	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara. 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara. 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan kebocoran emisi minimal 20% dari baseline data. 5. Melakukan kegiatan pengurangan BPO (Bahan Perusak Ozon). 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar 5% dari baseline data. 7. Melakukan efisiensi energi minimal 5% dari baseline data.
Limbah B3	1. Mempunyai program 3R (<i>Reuse, Recycle, Recover</i>) untuk pengelolaan limbah B3

Aspek	Indikator
	2. Melakukan upaya 3R minimal 30% dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data. 3. Mempunyai program 3R kegiatan pengolahan limbah non B3. 4. Melakukan upaya minimal 30% dari total limbah padat non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.
Padat non B3	1. Mempunyai program 3R kegiatan pengolahan limbah non B3. 2. Melakukan upaya minimal 30% dari total limbah padat non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.
Sistem Manajemen Lingkungan	1. Melakukan audit lingkungan secara keseluruhan berkala. 2. Memperoleh sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali. 3. Telah mendapatkan peringkat PROPER hijau selama dua kali berturut-turut.
Community Development	1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat. 2. Mendapatkan penghargaan

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 2. 3
Indikator Hijau

Aspek	Indikator
Pencemaran Air	1. Melakukan audit penggunaan air. 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.

Aspek	Indikator
	3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.
Pencemaran udara/ energi	1. Mempunyai program konservasi energi dan penggunaan energi dan penggunaan emisi udara. 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara. 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi kebocoran minimal 2% dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (Bahan Perusak Ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2%
Limbah B3	1. Melakukan upaya 3R minimal 20% dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian 2. Melakukan upaya 3R total minimal 20% dari total limbah non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R.
Padat non B3	1. Melakukan upaya 3R total minimal 20% dari total limbah non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R.
Sistem Manajemen Lingkungan	1. Melakukan audit lingkungan secara keseluruhan. 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya.
Community Development	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi. 2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 2. 4
Indikator Biru

Aspek	Indikator
Air	1. 100% data pemantauan BMAL (Baku Mutu Air Limbah) 2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan
AMDAL	1. Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/ RPL atau UKL / UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL.
Udara	1. Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan. 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah >5 cerobong dapat dilakukan pemantauan minimal 80% dari jumlah total cerobong 3. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. 4. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan 5. 100% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan. 6. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.
Limbah B3	1. Memenuhi $\geq 90\%$ ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 $\geq$ dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3 3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping dan open burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH 4. Melakukan upaya 3R

Tabel 2. 5
Indikator Merah

Aspek	Indikator
AMDAL	1. Melaksanakan $< 50\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.

Aspek	Indikator
Air	1. Kurang dari 50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan kurang dari 50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi kurang dari 50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan
Udara	1. Pemantauan dilakukan kurang dari 3 cerobong 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah lebih dari 5 cerobong dilakukan pemantauan minimal kurang dari 30% dari jumlah total cerobong. 3. Memantau 50% parameter dari baku muku emisi spesifik dipantau kurang dari 2 parameter yang dominan. 4. Menyampaikan kurang dari 50% data pemantauan yang dipersyaratkan. 5. Kurang dari 50% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan. 6. Memenuhi kurang dari 50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.
Limbah B3	1. Memenuhi kurang dari 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 kurang dari 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan ysng tercatat dalam neraca LB3. 3. Sudah menghentikan <i>open dumping</i> dan <i>open burning</i>. 4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ketiga yang tidak memiliki izin. 5. Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang tidak memiliki izin.

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 2. 6
Indikator Hitam

Aspek	Indikator
AMDAL	1. Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh komisi

Aspek	Indikator
	AMDAL.
Air	1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500% BMAL dari 80% data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. 2. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali. 3. Melakukan bypass untuk pemantauan limbah dengan sengaja 4. Melakukan bypass lebih dari satu kali
Udara	1. Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali 2. 50% data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500% BMEU. Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.
Limbah B3	1. Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.1.5 *Intellectual capital*

2.1.5.1 Pengertian *Intellectual Capital*

Menurut Ulum (2017:82) mendefinisikan *intellectual capital* bahwa:

“*Intellectual capital* di definisikan sebagai selisih/perbedaan antara nilai perusahaan (bisnis perusahaan) dan nilai buku dari aset perusahaan tersebut atau dari nilai *financial capital*. *Intellectual capital* adalah istilah yang diberikan atas kombinasi aset tak berwujud, properti intelektual, karyawan dan infrastruktur perusahaan yang kemudian dapat berfungsi dengan baik”

Noor (2021:2) memaparkan bahwa *intellectual capital* adalah sebagai berikut:

“*Intellectual capital* atau modal intelektual adalah suatu aset yang tidak berwujud yang dapat memberikan sumber daya berbasis pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan bersaing perusahaan serta memberikan nilai dibanding perusahaan lain”.

Jaya (2021) menjelaskan *intellectual capital* sebagai berikut:

“*Intellectual capital* adalah sebuah aset strategis perusahaan dalam ekonomi yang berbasis pengetahuan dan merupakan salah satu sumber daya organisasi yang efisien”.

2.1.5.2 Klasifikasi/Komponen *Intellectual Capital*

Beberapa peneliti mengembangkan komponen *intellectual capital* berdasarkan berbagai pendekatan. Leif Edvinsson menyatakan bahwa *intellectual capital* terdiri dari *human capital* dan *structural capital*, kemudian Brinker menambahkan *customer capital* sebagai komponen lain. Sementara itu, Baruch Lev mengemukakan *intellectual capital* mencakup *market assets*, *intellectual property assets*, *human centered asset* dan *infrastructure asset*, sedangkan Draper mengklasifikasikan *intellectual capital* menjadi *human capital*, *structure capital*, *customer capital*, *organization capital*, *innovation capital* dan *process capital* (Ulum, 2017:83).

Menurut IFAC dalam (Ulum, 2017:86) bahwa :

“*Intellectual capital* diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu : *human capital*, *relational capital*, dan *organizational capital*. *Organizational capital* meliputi *intellectual property* dan *infrastructure assets*”.

Tabel 2. 7
Klasifikasi *Intellectual Capital*

<i>Organizational Capital</i>	<i>Human Capital</i>	<i>Relational Capital</i>
<i>Intellectual Property:</i> – <i>Patents</i>	– <i>Brands</i> – <i>Customers</i>	– <i>Know-how</i> – <i>Education</i>

<i>Organizational Capital</i>	<i>Human Capital</i>	<i>Relational Capital</i>
– <i>Copyrights</i> – <i>Design rights</i> – <i>Trade secret</i> – <i>Trade marks</i> – <i>Service marks</i> <i>Infrastructure Assets:</i> – <i>Management philosophy</i> – <i>Corporate culture</i> – <i>Management processes</i> – <i>Informastion systems</i> – <i>Networking systems</i> <i>Financial relations</i>	– <i>Customer loyalty</i> – <i>Backlog orders</i> – <i>Company names</i> – <i>Distribution channels</i> – <i>Business collaborations</i> – <i>Licensing agreements</i> – <i>Favourable contracts</i> – <i>Franchising agreements</i>	– <i>Vocational qualification</i> – <i>Work-related knowledge</i> – <i>Work-related competencies</i> – <i>Entrepreneurial spirit, innovativeness, proactive and reactive abilities, changeability</i> – <i>Pyschometric valuation</i>

Sumber : (Ulum, 2017:86)

Berdasarkan Pulic (2000) dalam Jawak & Lubis (2023) modal *intellectual capital* terdiri dari 3 komponen yakni *human capital*, *structural capital*, serta *relational capital*. Berikut ini merupakan penjelasan dari komponen-komponen *intellectual capital* yaitu:

1. *Human Capital*

Human Capital mempresentasikan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang mencerminkan kemampuan kolektif yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki orang-orang atau karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut.

2. *Structural Capital* atau *Organization Capital*

Structural Capital merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk

menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan

3. *Relational Capital* atau *Customer Capital*

Relational Capital merupakan komponen *Intellectual Capital* yang memberikan nilai secara nyata. Merupakan hubungan yang harmonis/*association network* yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar.

2.1.5.3 Metode Pengukuran *Intellectual Capital*

Menurut Tan et al (2007) dalam (Ulum, 2017:94) terdapat dua metode dalam pengukuran *Intellectual Capital* yaitu:

Metode pengukuran yang tidak berbasis moneter.

1. *The Blance Scorecard*, dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (1992).

The Blance Scorecard digunakan sebagai metode pengukuran *Intellectual Capital* dengan mengevaluasi kinerja keuangan dan kinerja non keuangan kedalam 4 perpektif, yaitu:

- a. Perpektif keuangan
- b. Perpektif pelanggan
- c. Perspektif bisnis internal
- d. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran

2. *Brooking's Technology Broked Methode*

Metode pengukuran *Intellectual Capital* yang dikembangkan oleh brooking (1996) yang terdiri dari *market assets*, *human centered assets*, *intellectual property assets*, dan *infrastructural assets*.

3. *The Skandia IC Report Method*

Metode ini dikembangkan oleh Edvinsson dan Mallone 1997 untuk mengukur intangibles yang berfokus pada 5 perpektif, yaitu :

- a. *Financial focus*
- b. *Customer focus*
- c. *Precess focus*
- d. *Renewal dan development focus*
- e. *Human focus*

4. *The IC Index*

IC Index model dikembangkan oleh Roos et al (1997) dengan membagi 3 elemen yaitu *human capital*, *organizational capital* dan *customer capital*.

5. *Intangible Asset Monitor Approach*

Metode ini dikembangkan oleh Sveiby (1997) yang mengukur 4 aspek dari penciptaan nilai dari aset tdak berwujud, melalui:

- a. Pertumbuhan/ pembaruan
- b. Efisiensi
- c. Stabilitas.

Metode pengukuran intellectual capital yang berbasis moneter

1. The EVA and MVA model

Metode ini dihitung dengan menyesuaikan laba yang diungkap perusahaan dengan beban yang berhubungan dengan intangible.

2. *The Market And Book Value Model*

Nilai *Intellectual Capital* diperhitungkan dari perbedaan antara nilai pasar saham (firm's stock market value) dan nilai buku perusahaan (firm's book value).

3. *Tobins's Q Methode*

“Q” adalah rasio dari nilai pasar saham perusahaan dibagi dengan biaya pengganti (replacement cost) aset. Perubahan pada “Q” merupakan proksi untuk pengukuran efektif tidaknya kinerja intellectual capital perusahaan.

4. *Pulic's VAIC™ Models*

Mengukur seberapa dan sebagaimana efisiensi *Intellectual Capital* dan *capital employed* menciptakan nilai yang berdasarkan pada hubungan tiga komponen utama, yaitu:

- a. *Capital employed*
- b. *Human capital*
- c. *Structural capital*

5. *Calculated Intangible Value*

Mengakulasi kelebihan return pada hard assets kemudian menggunakan figur ini sebagai dasar untuk menentukan proporsi dari return yang dihubungkan dengan intangible assets.

6. *The Knowledge Capital Earnings Models*

Knowledge capital earning dihitung sebagai porsi atas kelebihan *normalized earning* dan tambahan *expected earnings* yang bisa dihubungkan kepada *books assets*.

2.1.5.4 Pengukuran *Intellectual Capital*

Modified-Value Added Intellectual capital Coefficiency (M-VAIC) merupakan pengukuran intellectual capital yang didasarkan pada VAICTM. Seperti model yang dikemukakan oleh Pulic (1998). Perbedaan antara metode MVAIC dengan metode VAICTM adalah adanya tambahan komponen baru *Relation Capital Efficiency* (RCE) yang di dapatkan dari besarnya biaya untuk pemasaran. Berikut ini penjelasan tahapan-tahapan dalam menghitung MVAIC adalah sebagai berikut:

1. Menghitung nilai *Value Added* (VA) dengan menggunakan rumus :

$$VA = OP + EC + D + A$$

Keterangan:

- OP = Laba operasi / laba usaha (*Operating Profit*)
- EC = Beban karyawan (*Employee Cost*)
- D = Depresiasi (*Depreciation*)
- A = Amortisasi (*Amortization*)

Atau menggunakan

$$VA = OUT - IN$$

Keterangan

Out = total penjualan dan pendapatan

In = beban (beban penjualan dan biaya – biaya lain selain beban karyawan)

2. Menghitung nilai *Human Capital Efficiency* (HCE) atau rasio VA terhadap HC dengan menggunakan rumus :

$$HCE = \frac{VA}{HC}$$

Keterangan :

HCE = *Human Capital Efficiency*

VA = *Value Added*

HC = *Human Capital* (beban karyawan)

3. Menghitung nilai *Structural Capital Efficiency* (SCE) atau rasio SC terhadap VA dengan menggunakan rumus :

$$SC = VA - HC$$

$$SCE = \frac{SC}{VA}$$

Keterangan :

SC = *Structure Capital*

SC = *Value Added – Human Capital*

SCE = *Structure Capital Efficiency*

VA = *Value Added*

4. Menghitung nilai *Relational Capital Efficiency* (RCE) atau rasio RC terhadap VA dengan menggunakan rumus :

$$RCE = \frac{RC}{VA}$$

Keterangan :

RCE = *Relational Capital Efficiency*

VA = *Value Added*

RC = *Relational Capital* (biaya pemasaran)

5. Menghitung *Capital Employee Efficiency* (CEE) atau rasio VA terhadap CE dengan menggunakan rumus :

$$CEE = \frac{VA}{CE}$$

Keterangan :

CEE = *Capital Employed Efficiency*

VA = *Value Added*

CE = *Capital Employed* (nilai buku dari total aset)

6. Menghitung *Intellectual Capital Efficiency* (ICE) dengan menggunakan rumus:

$$ICE = HCE + SCE + RCE$$

Keterangan :

ICE = *Intellectual Capital Efficiency*

SCE = *Structure Capital Efficiency*

HCE = *Human Capital Efficiency*

7. Menghitung MVAIC dengan menggunakan rumus :

$$MVAIC = ICE + CEE$$

Keterangan :

MVAIC = *Modified VAIC*

ICE = *Intellectual Capital Efficiency*

CEE = *Capital Employed Efficiency*

Metode MVAIC dapat digunakan untuk mengukur *Intellectual Capital* di semua sektor industri tidak hanya pada sektor perbankan. Metode MVAIC didesain untuk menyajikan informasi tentang *Value Creation Efficiency* dari aset berwujud (*tangible assets*) dan aset takterwujud (*intangible asset*) yang dimiliki perusahaan. metode ini juga digunakan sebagai ukuran kinerja ICP (*Intellectual Capital Performance*) atau disebut juga *Business Performance Indicator*

Ulum (2014:116) menyatakan bahwa untuk memberikan kategori dari hasil perhitungan MVAIC berdasarkan dengan kriteria yaitu :

Tabel 2. 8
Kriteria Intellectual Capital

Kategori	Penilaian MVAIC
<i>Top Performers</i>	MVAIC di atas 3,50
<i>Good Performes</i>	MVAIC antara 2,50 – 3,49
<i>Common Performers</i>	MVAIC antara 1,5 - 2,49
<i>Bad Performers</i>	MVAIC dibawah 1,5

Sumber : Ulum (2014:116)

2.1.6 Corporate Size (Ukuran Perusahaan)

2.1.6.1 Pengertian Corporate Size

Menurut Sudarno et al., (2022:109) memaparkan ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

“Ukuran perusahaan adalah nilai yang memberitahukan besar kecilnya perusahaan. terdapat banyak sekali proksi yang dipakai untuk mewakili ukuran perusahaan yakni jumlah karyawan, total aktiva, nilai pasar saham, total penjualan, dan lain-lain semuanya berkorelasi tinggi”.

Menurut Hidayat (2024:42) mendefinisikan ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

“Ukuran Perusahaan adalah metrik yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya sebuah perusahaan. metrik ini memberikan gambaran tentang skala operasional dan kapasitas perusahaan dalam pasar”.

Menurut Jogiyanto (2013) dalam Hermawan & Wibowo (2015:1) menyatakan ukuran perusahaan sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain)”.

Brigham et al (2016) dalam Thomas Sumarsan Goh (2023:47) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah

“Total aset perusahaan dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang cocok untuk menilai ukuran perusahaan ketika perusahaan dengan total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai kematangan pada tahun ini dan perusahaan tersebut dipertimbangkan stabil dan memiliki prospek jangka panjang”.

2.1.6.2 Klasifikasi *Corporate Size* (Ukuran Perusahaan)

UU No. 20 Tahun 2008, mengelompokkan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengelompokan ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total asset yang dimiliki dan total penjualan tahun perusahaan tersebut. UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 9
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Asset (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>10 Juta – 10 M	2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10m	>50 M

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional dalam Sulistiono (2010) bahwa:

1. Perusahaan kecil

Perusahaan yang dikategorikan perusahaan kecil apabila perusahaan tersebut memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

2. Perusahaan menengah

Perusahaan dikategorika perusahaan menengah apabila perusahaan tersebut memiliki kekayaan bersih antara Rp. 1.000.000.000,00 sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 dan tidak termasuk bagunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.1.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00

3. Perusahaan besar

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan yang besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,00.

Klasifikasi perusahaan besar atau kecil yang diatur dalam Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-11/PM/1997/Tahun 1997 bahwa:

“perusahaan menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia dan mempunyai jumlah kekayaan (total assets) tidak lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan besar dan kecil. Perusahaan menengah atau kecil yaitu perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan total asset tidak lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sebaliknya perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan total asset lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/PJOK.04/2017 Pasal 1 bahwa :

1. Emiten dengan aset skala kecil yang selanjutnya disebut emiten skala kecil adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang

memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

2. Emiten dengan aset skala menengah yang selanjutnya disebut emiten skala menengah adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perusahaan dikategorikan menjadi perusahaan dengan skala aset kecil, menengah, dan besar. Perusahaan kecil yaitu perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan total aset tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), perusahaan dengan skala aset menengah yaitu perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan perusahaan dengan skala aset besar yaitu perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

2.1.6.3 Pengukuran *Corporate Size* (Ukuran Perusahaan)

Menurut Hidayat (2024:46-48) adapun untuk menghitung ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Total Aktiva

Jumlah keseluruhan kekayaan atau sumber daya bernilai ekonomis yang dimiliki perusahaan.

2. Jumlah Karyawan

Seiring banyak jumlah karyawan, maka dapat menjadi indikasi ukuran perusahaan yang besar. Ukuran ini memiliki kelemahan pada usaha tertentu seperti start up yang umumnya tidak memiliki banyak karyawan karena banyak automasi pekerjaan.

3. Total Penjualan

Perusahaan besar memiliki penjualan yang besar juga. Ukuran ini memiliki kelemahan pada omset yang besar tetapi perusahaan dapat mengalami kerugian sehingga dapat menimbulkan bias pengukuran. Perusahaan yang mengalami rugi secara ukuran tidak terlalu baik.

4. Total Ekuitas

Perusahaan besar tentunya memiliki modal yang besar juga, termasuk saham sendiri, saham publik, dan lainnya. Ukuran ini cukup akurat karena bagaimanapun tetap modal bersih menjadi perusahaan yang baik. Pengukuran ini memiliki kelemahan pada perusahaan yang mengalami defisiensi (ekuitas negatif).

5. Total Utang

Perusahaan besar umumnya memiliki utang yang besar juga untuk mendapatkan pendanaan eksternal. Akan tetapi kelemahan pengukuran adalah tidak semua perusahaan mau memanfaatkan pendanaan eksternal.

6. Kapitalisasi Pasar

Pengukuran hanya berfungsi pada perusahaan yang ada di bursa dan tidak dapat digunakan untuk perusahaan tertutup

7. Jumlah Anak Perusahaan

Pengukuran ini bisa menjadi alternatif pengukuran. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikuasi atau baik secara langsung maupun tidak, oleh perusahaan lain yang disebut perusahaan induk atau holding. Anak perusahaan dapat berupa firma, persekutuan, perseroan. Kelemahan pengukuran adalah bisa saja perusahaan memiliki anak usaha, tetapi anak usahanya berukuran kecil.

2.1.6.4 Proksi *Corporate Size* (ukuran perusahaan)

Menurut Harahap (2016) dalam Thomas Sumarsan Goh (2023:49), ukuran perusahaan diukur dengan mengambil logaritma natural ($\ln$) dari rata-rata total aset perusahaan. penggunaan total aset didasarkan bahwa total aset mencerminkan kekayaan, skala operasional, dan sumber daya yang digunakan perusahaan. Logaritma natural akan menyederhanakan jumlah aset perusahaan dengan nilai ratusan miliar atau bahkan triliun namun tidak mengubah proporsi aset yang sesungguhnya. Dan total aset

suatu perusahaan juga menggambarkan besar kecilnya perusahaan tersebut, semakin besar total kepemilikan aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar juga ukuran perusahaannya. Rumus perhitungan ukuran perusahaan adalah:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln \text{Total Assets}$$

2.1.7 Sustainability Reporting

2.1.7.1 Pengertian Sustainability Reporting

Berdasarkan pada Global Reporting Initiative (GRI) dalam (Izzaty, 2024:79) *sustainability reporting* adalah

“*Sustainability Reporting* adalah laporan yang dipublikasikan oleh suatu perusahaan mengenai dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang diakibatkan oleh operasional bisnis perusahaan”.

Fuadah (2020:48) menjelaskan bahwa laporan keberlanjutan atau *sustainability reporting* sebagai berikut :

“Laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan menjadi tren dan kebutuhan bagi perusahaan”.

Fuadah et al (2018:13) mendefinisikan *sustainability reporting* sebagai berikut:

“Pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) didefinisikan sebagai proses yang membantu perusahaan dalam menetapkan tujuan, mengukur kinerja dan mengelola perubahan menuju ekonomi global yang berkelanjutan, yang mencerminkan dampak positif dan negatif”.

Menurut PJOK Nomor 51/PJOK.03/2017 laporan keberlanjutan (*sustainability report*) adalah

“Laporan keberlanjutan adalah laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat yang memuat informasi mengenai kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu perusahaan jasa keuangan dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis secara keberlanjutan”.

2.1.7.2 Manfaat *Sustainability Reporting*

Menurut Fuadah (2020:21) ada beberapa manfaat dari pengungkapan laporan berkelanjutan (*Sustainability Reporting*) yaitu antara lain:

1. Untuk mengungkapkan semua bidang selain mengenai keuangan yaitu berkaitan dengan bidang ekonomi, lingkungan sosial, dan tata kelola perusahaan.
2. Untuk mengungkapkan kebijakan perusahaan dan menjaga kondisi lingkungan dan alam sekitarnya.
3. Untuk meningkatkan citra dan nama baik dari perusahaan bagi pelanggan dan masyarakat sekitarnya
4. Untuk meningkatkan minat investor tidak saja investor dalam negeri tetapi juga investor asing untuk berinvestasi di Indonesia dan dapat melihat tidak saja laporan keuangan tetapi juga laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*)

2.1.7.3 Prinsip – Prinsip *Sustainability Reporting*

Prinsip *sustainability reporting* sebagai panduan sebuah organisasi dalam memastikan kualitas dan penyajian yang tepat dalam melaporkan sebuah informasi.

Informasi yang berkualitas memungkinkan memudahkan pengguna informasi untuk melakukan penilaian dan pengambilan keputusan. Prinsip *sustainability reporting* berdasarkan Global Reporting Initiative adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan (*Accuracy*)

Prinsip ketepatan mengharuskan organisasi menyajikan informasi yang akurat, benar, dan rinci sehingga memungkinkan pengguna laporan untuk menilai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.

2. Keseimbangan (*Balance*)

Prinsip keseimbangan mengharuskan organisasi menyajikan informasi secara objektif dan tidak memihak, dengan menggambarkan baik dampak positif maupun dampak negatif dari aktivitas perusahaan.

3. Kejelasan (*Clarity*)

Prinsip kejelasan menekankan bahwa informasi yang dilaporkan harus mudah diakses dan mudah dipahami oleh pengguna laporan.

4. Keterbandingan (*Comparability*)

Prinsip keterbandingan mengharuskan organisasi untuk melaporkan informasi secara konsisten dari waktu ke waktu sehingga memungkinkan pengguna laporan melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode maupun dengan perusahaan lain.

5. Kelengkapan (*Completeness*)

Prinsip kelengkapan mengharuskan organisasi menyajikan informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai dampak aktivitasnya selama periode pelaporan. Informasi yang dilaporkan harus mencakup aktivitas, peristiwa, dan dampak yang ditimbulkan.

6. Konteks keberlanjutan (*Sustainability Context*)

Prinsip konteks keberlanjutan menekankan bahwa informasi yang dilaporkan harus ditempatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Perusahaan perlu menjelaskan bagaimana aktivitasnya berkontribusi terhadap isu keberlanjutan global seperti perubahan iklim, penggunaan sumber daya alam, serta kesejahteraan sosial masyarakat.

7. Ketepatan waktu (*Timeliness*)

Prinsip ketepatan waktu mengharuskan organisasi menyampaikan informasi secara berkala dan tepat waktu agar pengguna laporan dapat menggunakan informasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan.

8. Verifikasi (*Verifiability*)

Prinsip verifikasi menekankan bahwa informasi yang dilaporkan harus dapat diperiksa dan diverifikasi kebenarannya.

2.1.7.4 Pengungkapan *Sustainability Reporting*

Sustainability reporting merupakan salah satu cara perusahaan untuk memberikan informasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan. salah satu standar yang digunakan dalam

sustainability report adalah GRI Standar. Pengungkapan standar *sustainability reporting* berdasarkan *Global Reporting Initiative*.

Tabel 2. 10
Indikator Pengungkapan *Sustainability Reporting*

NO.	DISCLOSURE GRI STANDAR 2021	
General disclosures		
1. Aspek: Organisasi dan praktik pelaporan		
1	GRI 2: General Disclosures	2-1 Rincian organisasi
2		2-2 Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi
3		2-3 Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan
4		2-4 Penyajian kembali informasi
5		2-5 Penjaminan eksternal
2. Aspek: Aktivitas dan Pekerja		
6	GRI 2: General Disclosures	2-6 Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya
7		2-7 Tenaga kerja
8		2-8 Pekerja yang bukan pekerja langsung
3. Aspek: Tata Kelola		
9	GRI 2: General Disclosures	2-9 Struktur dan komposisi tata kelola
10		2-10 Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi
11		2-11 Ketua badan tata kelola tertinggi
12		2-12 Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak
13		2-13 Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak
14		2-14 Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan
15		2-15 Konflik kepentingan

16		2-16 Komunikasi masalah penting
17		2-17 Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
18		2-18 Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
19		2-19 Kebijakan remunerasi
20		2-20 Proses untuk menentukan remunerasi
21		2-21 Rasio kompensasi total tahunan
4. Aspek: Strategi, kebijakan, dan praktik		
22	GRI 2: General Disclosures	2-22 Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan
23		2-23 Komitmen kebijakan
24		2-24 Menanamkan komitmen kebijakan
25		2-25 Proses untuk memperbaiki dampak negatif
26		2-26 Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah
27		2-27 Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
28		2-28 Asosiasi keanggotaan
29		2-29 Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan
30		2-30 Perjanjian perundingan kolektif
Material topics		
31	GRI 3: Topik Material	3-1 Proses atau panduan untuk menentukan topik material
32		3-2 Daftar topik material
33		3-3 Manajemen topik material
34	GRI 201: Kinerja Ekonomi	201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
35		201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
36		201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya

37		201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
38	GRI 202: Keberadaan Pasar	202-1 Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
39		202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat
40	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
41		203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
42	GRI 204: Praktik Pengadaan	204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
43	GRI 205: Antikorupsi	205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
44		205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi
45		205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
46	GRI 206: Perilaku Antipersaingan	206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku antipersaingan, praktik antipakat dan monopoli
47	GRI 207: Pajak	207-1 Pendekatan terhadap pajak
48		207-2 Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak
49		207-3 Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak
50		207-4 Laporan per negara
51	GRI 301: Material	301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
52		301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan
53		301-3 Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya
54	GRI 302: Energi	302-1 Konsumsi energi dalam organisasi

55		302-2 Konsumsi energi di luar organisasi
56		302-3 Intensitas energi
57		302-4 Pengurangan konsumsi energi
58		302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
59	GRI 303: Air dan Efluen	303-1 Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama
60		303-2 Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
61		303-3 Pengambilan air
62		303-4 Pembuangan air
63		303-5 Konsumsi air
64	GRI 304: Keanekaragaman Hayati	304-1 Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
65		304-2 Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
66		304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi
67		304-4 Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
68	GRI 305: Emisi	305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
69		305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
70		305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
71		305-4 Intensitas emisi GRK
72		305-5 Pengurangan emisi GRK
73		305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS)

74		305-7 Nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya
75	GRI 306: Limbah	306-1 Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah
76		306-2 Manajemen dampak signifikan terkait limbah
77		306-3 Timbulan limbah
78		306-4 Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir
79		306-5 Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir
80	GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok	308-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
81		308-2 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
82	GRI 401: Kepegawaian	401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
83		401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu
84		401-3 Cuti melahirkan
85	GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen	402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
86	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja	403-1 Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
87		403-2 Pengungkapan, Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi Insiden
88		403-3 Layanan kesehatan kerja
89		403-4 Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja

90		403-5 Pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja
91		403-6 Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
92		403-7 Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
93		403-8 Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
94		403-9 Kecelakaan kerja
95		403-10 Penyakit Akibat Kerja
96	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan	404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
97		404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
98		404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
99	GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara	405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
100		405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
101	GRI 406: Nondiskriminasi	406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
102	GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif	407-1 Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
103	GRI 408: Pekerja anak	408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
104	GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja	409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja

105	GRI 410: Praktik Keamanan	410-1 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
106	GRI 411: Hak Masyarakat Adat	411-1 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
107	GRI 413: Masyarakat Setempat	413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan
108		413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat
109	GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok	414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
110		414-2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
111	GRI 415: Kebijakan Publik	415-1 Kontribusi politik
112	GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	416-1 Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
113		416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
114	GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan	417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
115		417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa
116		417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
117	GRI 418: Privasi Pelanggan	418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan

sumber : www.globalreporting.org

2.1.7.5 Pengukuran *Sustainability Report*

sesuai dengan pedoman Global Reporting Initiative (GRI) *Sustainability Report* diukur dengan *Sustainability report Disclosure Index* (SRDI). *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI) adalah index yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan *Sustainability Report* suatu perusahaan (Febriyanti, 2021).

untuk memperoleh SRDI dapat menggunakan rumus :

$$SRDI = \frac{n}{K}$$

Keterangan :

n = Jumlah indikator yang diungkapkan perusahaan

K = Jumlah indikator yang seharusnya di ungkapkan

2.1.8 *Good corporate governance*

2.1.8.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Franita (2018:10) mendefinisikan *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

“*Good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat”.

Hartati (2024:7) memaparkan bahwa *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

“*Good corporate governance* menurut peraturan menteri negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan

mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis”.

Menurut Nasiroh & Priyadi (2018) *good corporate governance* adalah sebagai

berikut:

“*Good Corporate Governance* (GCG) atau yang lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip yang mengarah dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *stakeholders* khususnya dan *stakeholders* pada umumnya”.

Menurut Zarkasyi (2010) dalam Sari (2021:20) mendefinisikan GCG sebagai berikut :

“GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antar pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

2.1.8.2 Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Utomo (2019:36) setiap perusahaan harus memastikan asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan, antara lain :

1. Transparansi (*transparency*)

perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan sebagai bentuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis,

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan serta tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang

4. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola masing-masing organ secara independen sehingga tidak ada saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fainess*)

Perusahaan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1.8.3 Fungsi – Fungsi *Good Corporate Governance*

Menurut Hartati (2024:10) terdapat fungsi – fungsi dan pihak – pihak yang terkait dalam penerapan GCG adalah sebagai berikut :

1. Fungsi oversight (perhatian secara keseluruhan) oleh board of directors (dewan direksi)

2. Fungsi enforcement (penegakan) oleh CEO
3. Fungsi advisory (penasihat/pemberi saran) oleh dewan komisaris
4. Fungsi monitoring (pemantauan) oleh stakeholder

Corporate governance berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dan atau capital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer.

2.1.8.4 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Muh Effendi (2009) dalam Hartati (2024:11) terdapat 4 (empat) manfaat yang diperoleh bagi perusahaan yang menerapkan prinsip GCG, yaitu:

1. Suana kerja menjadi kondusif dan tenang karena terbina hubungan yang harmonis antara sesama karyawan dan antara karyawan dengan manajemen.
2. Kinerja perusahaan meningkat karena karyawan lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja sehingga dapat memberikan hasil terbaik bagi perusahaan.
3. Perusahaan bisa terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat merugikan berbagai pihak karena segala kebijakan ditetapkan secara transparan dan akuntabel serta memenuhi prinsip keadilan (*fairness*)

4. Daya saing (*comvetitiveness*) perusahaan akan meningkat karena dapat mempertahankan karyawan yang kapabel, kompeten dan professional.

2.1.8.5 Tujuan Good Corporate Governance

Menurut Hartati (2024:15) tujuan *good corporate governance* menurut komite nasional kebijakan *governance* (KNKG) sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya tranparansi, akuntabilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
4. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.1.8.6 Elemen-Elemen Good Corporate Governance

Elemen - elemen *corporate governance* sangat dibutuhkan untuk menjadikan tata kelola perusahaan semakin baik (Sari, 2021:21-26). Berikut elemen-elemen *corporate governance* :

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan. Dewan komisaris memiliki peran penting dalam penerapan good corporate governance karena berfungsi memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sari, 2021).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perusahaan, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

Dalam menjalankan fungsinya, dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Dewan komisaris juga berperan dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan.

POJK Nomor 33/POJK.04/2014 mengatur bahwa dewan komisaris terdiri atas paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris. Selain itu, jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Struktur dewan komisaris pada umumnya terdiri atas komisaris utama, komisaris, dan komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan pihak yang dapat memengaruhi independensinya sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif.

2. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang fungsi utamanya adalah memberi perhatian secara bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Sebagai organ perusahaan yang memberikan perhatian secara bertanggung jawab, dewan direksi seharusnya menjadi panutan bagi anggota-anggota lain perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menerapkan kode etik dan *corporate governance* yang berkualitas. Dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan perusahaan dan arah kebijakan serta mengelola sumber daya yang ada di perusahaan (Suharti et al., 2024)

3. Komite Audit

Berdasarkan kerangka dasar hukum di Indonesia perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris, oleh karena itu semua perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari diluar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk komite audit yang salah satu tugasnya berkaitan dengan audit eksternal berhubungan dengan audit internal dan pengendalian internal (Sari, 2021).

Komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan di perusahaan – perusahaan (Suharti et al., 2024)

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah organisasi. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Perusahaan yang dimonitor oleh investor institusional dapat mempengaruhi manajemen sehingga manajemen bisa lebih fokus terhadap pekerjaannya sehingga menaikkan performansi perusahaan (Sari, 2021).

5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris. Kepemilikan manajerial merupakan konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen didalam suatu perusahaan (Sari, 2021).

2.1.8.7 Pengukuran *Good Corporate Governance*

Terdapat beberapa macam pengukuran *good corporate governance*, berikut adalah pengukuran *good corporate governance* :

1. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan komisaris adalah jumlah seluruh dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menjumlahkan seluruh anggota dewan komisaris (Irfan & Sarumpaet, 2023).

$$\text{Ukuran Dewan komisaris} = \text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}$$

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang diubah dengan UU Cipta Kerja, jumlah minimal dewan komisaris adalah 1 (satu) orang jika perseroan tidak memiliki Risiko tinggi. Namun, jika Perseroan memiliki Risiko tinggi, melibatkan dana Masyarakat, atau emiten, wajib memiliki minimal 2 (dua) orang.

2. Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi adalah jumlah direktur yang duduk di dewan perusahaan.

Ukuran dewan direksi diukur dengan menjumlahkan seluruh direktur yang duduk di dewan perusahaan (Irfan & Sarumpaet, 2023).

$$\text{Dewan Direksi} = \text{Jumlah Anggota Dewan Direksi}$$

Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 mengatur bahwa dewan komisaris terdiri atas paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris.

3. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu dewan komisaris menjalankan fungsinya. Komite audit diukur dengan menjumlah seluruh anggota komite audit (Irfan & Sarumpaet, 2023).

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Dalam Komite Audit}$$

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru yang berlaku, jumlah minimal anggota komite audit di Perusahaan (terutama emiten atau Perusahaan publik) adalah 3 (tiga) orang.

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang di miliki institusi pemerintah, asuransi, bank dan lain lain. Kepemilikan institusional diukur

dengan menjumlahkan saham yang dimiliki oleh pihak institusional dibagi dengan total saham beredar (Pramanaswari, 2024).

$$KI = \frac{Jumlah\ Saham\ Institusional}{Jumlah\ Saham\ Yang\ Beredar} \times 100\%$$

berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih wajib dilaporkan kepada OJK.

5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan atau pengelola perusahaan sekaligus sebagai pemilik perusahaan.

Mengukur persentase kepemilikan manajerial diukur dengan membagi kepemilikan saham yang dimiliki manajemen perusahaan dibagi dengan seluruh jumlah saham yang beredar (Pramanaswari, 2024).

$$KM = \frac{Jumlah\ Saham\ Manajerial}{Jumlah\ Saham\ Yang\ Beredar} \times 100\%$$

Tidak terdapat ketentuan khusus dalam regulasi mengenai batas minimal kepemilikan manajerial, sehingga besarnya kepemilikan ditentukan berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan.

6. *Corporate governance disclosure index (CGDI)*

Corporate Governance Disclosure Index (CGDI) didasarkan peraturan yang ditetapkan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor kep-431/BL/2012 Peraturan

Nomor X.K.6. Terdapat 18 point yang memuat 96 item pengungkapan yang digunakan.

Berikut adalah penjelasannya mengenai klasifikasi dengan item-itemnya :

Tabel 2. 11
Indeks Pengungkapan *Good Corporate Governance*

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
1.	Pemegang Saham	a. Uraian mengenai hak pemegang saham b. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang sama terhadap hak pemegang saham c. Tanggal pelaksanaan RUPS d. Hasil RUPS
2.	Dewan Komisaris	a. Nama -nama anggota dewan komisaris b. Status setiap anggotang (komisaris independen atau komisaris bukan independen) c. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dewan komisaris d. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota dewan komisaris e. Mekanisme dan kriteria kinerja masing-masing anggotan dewan komisaris f. jumlah rapat dewan komisaris, termasuk rapat gabungan dengan direksi g. Jumlah kehadiran setiap anggota dewan komisaris dalam rapat h. Mekanisme pengambilan keputusan
3.	Direksi	a. Nama - nama anggota direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing

		b. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab direksi c. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab direksi d. Mekanisme pengambilan wewenang e. Mekanisme pengdelegasian wewenang f. kebijakan dan jumlah remunerasi anggota direksi serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Perusahaan g. Jumlah rapat yang dilakukan oleh direksi, termasuk rapat gabungan dengan dewan komisaria
4.	Komite Audit	a. Nama b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja dan dasar hukum penunjukan c. Riwayat pendidikan d. Periode jabatan anggota komite audit e. Pengungkapan independensi komite audit f. jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit g. Tingkat kehadiran komite audit dalam rapat h. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (charter) komite audit
5.	Komite Nominasi Dan Remunerasi	a. Riwayat jabatan, pengalaman kerja dan dasar hukum penunjukan b. Periode jabatan anggota komite c. Riwayat pendidikan d. Uraian tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi e. jumlah pertemuan yang dilakukan komite nominasi dan remunerasi

		f. Jumlah kehadiran rapat anggota komite nominasi dan remunerasi g. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi h. Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi
6.	Komite Manajemen Risiko	a. Nama dan jabatan anggota komite manajemen risiko b. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite manajemen risiko c. Uraian tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko d. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite manajemen risiko e. Jumlah kehadiran dalam setiap rapat f. laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite manajemen risiko g. Independensi anggota komite manajemen risiko
7.	Komite - Komite Lain Yang Dimiliki Oleh Perusahaan	a. Nama anggota komite b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja dan dasar hukum penunjukan c. Riwayat pendidikan d. Periode jabatan anggota komite e. jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat f. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite g. Independensi anggota komite
8.	Sekretaris Perusahaan	a. Nama sekretaris perusahaan b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja dan dasar hukum penunjukan c. Riwayat pendidikan d. Periode jabatan sekretaris perusahaan e. Uraian tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan

9.	Audit Internal	a. Nama anggota audit internal b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja dan dasar hukum penunjukan c. Struktur dan kedudukan unit audit internal d. Tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (charter) unit audit internal e. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku
10.	Sistem Pengendalian Intern	a. Pengendalian keuangan dan operasional serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya b. Review atas efektivitas sistem pengendalian intern
11.	Manajemen Risiko Perusahaan	a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan b. Jenis risiko dan cara pengelolaan risiko c. Review atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan
12.	Perkara Penting Yang Dihadapi Oleh Perusahaan, Entitas Abka, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	a. Pokok perkara/ gugatan b. Status penyelesaian perkara/gugatan c. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan
13.	Pernyataan Sanksi Administrasi	a. Informasi tentang sanksi administrasi yang dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, dan direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku berakhir

14.	Akses Informasi dan Data Perusahaan	a. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan b. Daftar penyebaran informasi ke publik
15.	Kode Etik dan Budaya Perusahaan	a. Pokok-pokok kode etik b. Pokok - pokok budaya perusahaan (corporate culture) c. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya d. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi dewan komisari, direksi dan karyawan perusahaan
16.	Sistem Pelaporan Pelanggaran	a. Cara penyampaian pelanggaran b. Perlindungan bagi pelapor c. Penanganan pengaduan d. Pihak yang mengelola pengaduan e. Hasil dari penanganan pengaduan
17.	Pernyataan Penerapan GCG	a. Keberadaan prinsip - prinsip gcg b. Keberadaan pedoman pelaksanaan gcg dalam perusahaan c. Kepatuhan terhadap pedoman gcg d. Keberadaan board manual e. Struktur tata kelola perusahaan f. hasil penerapan gcg selama setahun g. Audit gcg (jas atestasi) oleh eksternal auditor
18.	Informasi Penting	a. Visi perusahaan b. Misi perusahaan c. Nilai - nilai perusahaan d. Kepemilikan saham oleh anggota dewan komisaris dan direksi beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya

		e. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan emiten jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak serta harga exercise f. uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan pasar modal g. Uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan h. Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan
--	--	--

Sumber : Lembaga Keuangan Nomor kep-431/BL/2012 Peraturan Nomor X.K.6.

Dalam penelitian ini, good corporate governance diproksikan menggunakan ukuran dewan komisaris yang diukur berdasarkan Jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Jumlah dewan komisaris diyakini mampu memberikan tekanan kepada manajemen dalam melaksanakan pengungkapan *sustainability reporting* sehingga manajemen akan menyajikan informasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan (Suharti et al., 2024).

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai *Corporate Environmental Performance*, *Intellectual Capital* dan *Corporate Size* terhadap

Sustainability Reporting dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 12
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Anastasia Yolanda Putri br Jawak dan Irsad Lubis (2023)	Pengaruh <i>Corporate Environmental Performance</i> dan <i>Intellectual Capital</i> terhadap <i>Sustainability Reporting</i> dengan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai Moderasi	<i>Corporate Environmental Performance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Sustainability Reporting</i> . <i>Intellectual Capital</i> tidak berpengaruh signifikan. <i>Good Corporate Governance</i> tidak mampu memoderasi hubungan variabel independen terhadap	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>corporate environmental performance, intellectual capital, sustainability reporting</i> , dan <i>good corporate governance</i> Perbedaan : Peneliti ini melakukan studi sektor mining, miscellaneous industry,

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			<i>Sustainability Reporting</i>	consumer goods, industry Infrastructure, utility, and transportation oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019.
2	Maya Indriastuti dan Anis Chariri (2021)	<i>The Effect of Carbon and Environmental Performance on Sustainability Report</i>	<i>Carbon performance</i> dan <i>environmental performance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability report</i> .	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>environmental performance</i> dan <i>sustainability report</i> Perbedaan : Peneliti melakukan studi empiri di perusahaan sektor pertambangan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 hingga 2019
3	Andi Irfan dan Hijrah Putri (2025)	Pengaruh Komite Audit dan <i>Human and Social Board Capital</i> terhadap <i>Sustainability Reporting</i> dengan Kinerja Lingkungan sebagai Variabel Moderasi	komite audit dan <i>human and social board capital</i> tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability reporting</i> . kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>sustainability reporting</i> .	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel kinerja lingkungan atau <i>environmental performance</i> dan <i>sustainability reporting</i>. Perbedaan : Peneliti menjadikan kinerja lingkungan atau <i>environmental performance</i> sebagai variabel moderasi bukan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				variabel independen.
4	Putri Lindeawati dan Januar Eky Pambudi (2025)	<i>Tax Intensity, Intellectual Capital, and Independent Commissioners on Sustainability Reporting Moderated by Company Size</i>	Tax intensity berpengaruh negatif terhadap <i>sustainability reporting</i> , <i>intellectual capital</i> dan <i>independent commissioners</i> berpengaruh positif terhadap <i>sustainability reporting</i> . Selain itu, <i>company size</i> tidak mampu memoderasi pengaruh <i>tax intensity</i> , namun mampu memperkuat pengaruh <i>intellectual capital</i> dan <i>independent</i>	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>intellectual capital</i> , <i>sustainability reporting</i> dan <i>company size</i> atau <i>corporate size</i> Perbedaan : Peneliti melakukan studi empiri pada perusahaan sektor consumer non cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			<i>commissioners terhadap sustainability reporting.</i>	selama 2019-2023
5	Retrisya Nioko dan Ai Hendrani (2024)	<i>The Effect of Profitability, Activity, Leverage, Company Size, Board of Directors and Audit Committee on Sustainability Report Disclosure</i>	ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , leverage berpengaruh negatif. Sementara itu, profitabilitas, aktivitas, dewan direksi, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>company size</i> atau <i>corporate size</i> dan <i>sustainability report</i> . Perbedaan : Peneliti melakukan penelitian di sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2022

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
6	Anggun Mita Tri Kusumawardani (2022)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> serta Dampaknya terhadap Return Saham	ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , sedangkan kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit tidak berpengaruh.	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>good corporate governance</i>, ukuran perusahaan atau <i>corporate size</i> dan <i>sustainability report</i> Perbedaan : Peneliti melakukan penelitian di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020.
7	Adinda Berliana Nur Jannah dan	Pengaruh Profitabilitas dan	profitabilitas tidak berpengaruh	Persamaan :

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	David Efendi (2023)	Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan.	Peneliti menggunakan variabel ukuran perusahaan atau <i>corporate size</i> dan <i>sustainability report</i> . Perbedaan : Peneliti melakukan studi empiris di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2021
8	Wijaya Triwacananingrum dan Mufti Adhiprawira Putera (2023)	Pengaruh <i>Firm Characteristic</i> pada <i>Sustainability Report Disclosure: Corporate</i>	leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , sedangkan	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>sustainability report</i> dan <i>corporate</i>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<i>Governance</i> sebagai Variabel Moderasi	profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh. Selain itu, <i>corporate governance</i> terbukti mampu memperkuat hubungan antara likuiditas dan <i>sustainability report</i> , tetapi tidak mampu memoderasi hubungan profitabilitas dan leverage.	<i>governance</i> atau <i>good corporate governance</i> . Perbedaan : Peneliti melakukan penelitian di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2021
9	Aliyyah Fitriyani dan Musa Said Sungkar (2024)	Pengaruh Penerapan <i>Green Accounting</i> , Kinerja Lingkungan, dan Profitabilitas terhadap Kinerja Keuangan dengan Tata	<i>green accounting</i> , kinerja lingkungan, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, tata	Persamaa : Peneliti menggunakan variabel kinerja lingkungan atau <i>environmental performance</i> dan tata kelola perusahaan atau

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	kelola perusahaan juga mampu memperkuat hubungan tersebut sebagai variabel moderasi	<i>good corporate governance</i> . Perbedaan : Peneliti melakukan penelitian di sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2022.
10	M. Husaini Nain Hasan, Irfan Zamzam, Iqbal M. Aris Ali, Zainuddin (2025)	Peran <i>Good Corporate Governance</i> dalam Memoderasi Hubungan antara <i>Green Accounting</i> , <i>Environmental Performance</i> , dan <i>Green</i>	<i>Green accounting</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial performance</i> , <i>environmental performance</i> berpengaruh negatif, dan <i>green intellectual capital</i> berpengaruh	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>good corporate governance</i> dan <i>environmental performance</i> . Perbedaan :

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<i>Intellectual Capital</i> terhadap <i>Financial Performance</i>	positif. Selain itu, <i>good corporate governance</i> tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel keberlanjutan dan kinerja keuangan	Peneliti melakukan studi empiri di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2023.
11	Agis Saeful Iman dan Suropto (2023)	Pengaruh Tekanan Pemangku Kepentingan, <i>Intellectual Capital</i> dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan	Tekanan pemangku kepentingan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keberlanjutan, sedangkan <i>intellectual capital</i> dan tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan.	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>intellectual capital</i> , tata kelola perusahaan atau <i>good corporate governance</i> dan laporan keberlanjutan atau

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				<i>sustainability report.</i> Perbedaan : Peneliti melakukan penelitian pada perusahaan yang tergabung dalam IDX Finance selama periode 2018 hingga 2021
12	Putri Adelia Septialani Hartono, Lilis Lasmini, Dhea Imroatul Fatihah (2025)	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i>	Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability reporting</i> , sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan.	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel ukuran perusahaan atau <i>corporate size</i> dan <i>sustainability reporting</i>. Perbedaan : Peneliti melakukan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				studi empiri perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023
13	Deliana Aryanti, Endang Setiya Rini, Vania Audrey Wibowo, Wulandari, Sparta (2023)	Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap CSR Disclosure dan Kinerja Keuangan dengan GCG sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap CSR Disclosure, namun tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selain itu, <i>Good Corporate Governance</i> terbukti mampu	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel kinerja lingkungan atau <i>environemntal performance</i> dan <i>good corporate governance</i> . Perbedaan : Peneliti melakukan studi empiri di

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			memperkuat hubungan kinerja lingkungan terhadap CSR Disclosure dan kinerja keuangan.	perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021
14	Manju Walkomarah, Endang Ruhayat, Sugiyanto (2025)	<i>Good Corporate Governance Moderates Green Intellectual Capital, Firm Performance and Enterprise Risk Management with Sustainability Performance</i>	<i>green intellectual capital dan firm performance</i> berpengaruh positif terhadap <i>sustainability performance</i> , sedangkan <i>enterprise risk management</i> tidak berpengaruh. Selain itu, <i>good corporate governance</i> terbukti mampu memperkuat hubungan <i>green intellectual</i>	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>good corporate governance</i> . Perbedaan : Peneliti melakukan studi empiris di perusahaan yang termasuk dalam indeks ESG Leaders di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2023

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			<i>capital dan firm performance terhadap sustainability performance, namun tidak mampu memoderasi enterprise risk management.</i>	
15	Rana Fathinah Ananda dan Yusnaini (2023)	<i>The Effect Of Board Of Commissioners And Board Of Directors On Sustainability Report Disclosure In Companies Registered On The IDX 2020</i>	dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>sustainability report disclosure</i> , sedangkan dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan.	Persamaan : Peneliti menggunakan variabel <i>good corporate governance</i>, <i>company</i> dan <i>sustainability report</i>. Perbedaan: Peneliti melakukan studi empiris di perusahaan yang terdaftar

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				di Bursa Efek Indonesia tahun 2020.

Sumber : jurnal terpublikasi yang telah diolah oleh penulis

2.2 Kerangka Pemikiran

Perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan melalui pengungkapan *sustainability reporting* sebagai bentuk tanggung jawab kepada *stakeholder*. Perusahaan dengan *environmental performance* yang baik cenderung meningkatkan pengungkapan untuk memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat. Selain itu, *intellectual capital* sebagai sumber daya tidak berwujud mampu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengungkapkan informasi keberlanjutan. *Corporate size* juga berperan karena perusahaan besar memiliki sumber daya dan tekanan *stakeholders* yang lebih tinggi untuk melakukan pengungkapan secara transparan. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan, sehingga diperlukan variabel moderasi yaitu *good corporate governance* yang berperan dalam meningkatkan transparansi dan memoderasi hubungan antara *corporate environmental performance*, *intellectual capital*, dan *corporate size* terhadap *sustainability reporting*.

2.2.1 Pengaruh *Corporate Environmental Performance* Terhadap *Sustainability*

Reporting

Sustainability Reporting merupakan suatu laporan yang menyajikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan melakukan praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas kinerja suatu organisasi dalam mencapai pembangunan keberlanjutan yang didasarkan pada kerangka pelaporan yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan melestarikan dan menjaga lingkungan tersebut, pemerintah mengadakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Informasi yang ada dalam *sustainability reporting* dan bagaimana kinerja lingkungan perusahaan dapat membantu *stakeholders* untuk memprediksi kemampuan bertahan perusahaan di masa mendatang (Chairanee et al., 2022).

Dari sudut pandang teori legitimasi, perusahaan berusaha menyesuaikan aktivitas operasionalnya dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Perusahaan yang semakin peduli terhadap lingkungan, yang tercermin melalui *sustainability reporting*, cenderung memperoleh kepuasan dan loyalitas *stakeholder*, khususnya masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu, semakin luas pengungkapan kinerja lingkungan yang dilakukan perusahaan dalam *sustainability reporting* dapat menjadi sinyal positif bagi *stakeholder* dalam menilai dan mengambil keputusan terhadap perusahaan (Made et al., 2020).

Menurut Jawak & Lubis (2023) dalam penelitian memaparkan bahwa :

“*Corporate Environmental Performance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Sustainability Reporting*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang lebih baik cenderung mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih luas sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada *stakeholders*”.

Menurut Chairanee et al., (2022) dalam penelitian menjelaskan bahwa :

“*Environmental Performance* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Hal ini dikarenakan hasil kinerja lingkungan yang didukung menggunakan PROPER yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan pemeringkatan ketaatan perusahaan dalam melakukan kinerja lingkungannya mempunyai penilaian yang baik maka akan dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan”.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Environmental Performance* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting*.

2.2.2 Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap *Sustainability Reporting*

Intellectual Capital merupakan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang berperan penting dalam menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. *Intellectual Capital* terdiri dari pengetahuan, informasi, intelektual, dan pengalaman yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai. Dalam konteks *sustainability reporting*, *Intellectual Capital* relevan karena perusahaan yang memiliki *Intellectual Capital* yang cenderung lebih proaktif dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan. *Human capital* yang kompeten dapat mengumpulkan dan mengelola data keberlanjutan dengan akurat, sementara *structural capital* yang baik

memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan melaporkan data tersebut secara sistematis dan akurat. *Relational capital* yang kuat juga mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan terbuka dalam melaporkan upaya keberlanjutan mereka (Arifin et al., 2025)

Dari sudut pandang *Resource based theory*, *intellectual capital* diposisikan sebagai sumber daya strategis yang bernilai, langka, dan sulit ditiru, yang dapat menciptakan keunggulan berkelanjutan (Hasan et al., 2025).

Menurut Arifin et al., (2025) didalam penelitiannya menjelaskan bahwa :

“*Intellectual Capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Artinya, peningkatan *intellectual Capital* akan meningkatkan pengungkapan *Sustainability Report*. Hal ini menunjukkan bahwa aset tak berwujud seperti pengetahuan, keterampilan dan inovasi karyawan penting untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab perusahaan dalam melaporkan keberlanjutan”.

Menurut Rahmawati & Suwarno (2025) didalam penelitiannya memaparkan bahwa :

“*Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap *Sustainability Reporting*. Perusahaan yang memiliki pengelolaan yang baik mencakup kompetensi sumber daya manusia, efisiensi sistem internal, serta kualitas hubungan eksternal akan lebih mampu menyusun pelaporan keberlanjutan yang tidak hanya formal, tetapi juga strategis dan relevan”.

Berdasarkan hasil penelitian diatas ditemukan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting*.

2.2.3 Pengaruh *Corporate Size* Terhadap *Sustainability Reporting*

Corporate Size untuk mengetahui seberapa besar atau kecil suatu perusahaan. *Corporate Size* yang besar cenderung memiliki citra yang baik dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil sehingga manajer perusahaan tersebut akan berusaha menjaga nama baik perusahaan dengan meningkatkan performa kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial, tidak hanya berfokus pada ekonomi. Semakin besar *Corporate Size* semakin besar perusahaan semakin tinggi usaha yang dilakukan manajer agar dapat meningkatkan citra perusahaan dengan cara meningkatkan pengungkapan *Sustainability Reporting* (Gunawan & Sjarief, 2022).

Dari sudut pandang teori legitimasi, perusahaan berusaha memperoleh penerimaan dari masyarakat dengan menunjukkan bahwa aktivitas operasional perusahaan telah sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan besar akan lebih terdorong untuk meningkatkan pengungkapan *sustainability reporting* sebagai bentuk transparansi dan upaya memperoleh legitimasi dari *stakeholder*, masyarakat dan pemerintah (Gunawan & Sjarief, 2022).

Menurut Retnoningsih et al., (2024) dalam penelitian menjelaskan bahwa :

“Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada *sustainability report*. Perusahaan besar yang mempunyai banyak aset aktivitas dan berkaitan dengan lebih banyak mitra terbukti mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan umum untuk sarana komunikasi dan semacam kewajiban entitas pada semua mitra atau *stakeholders*”.

Menurut Gunawan & Sjarief, (2022) didalam penelitiannya memaparkan bahwa :

“Ukuran perusahaan berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan mengakibatkan pengungkapan *Sustainability Report* semakin banyak karena semakin besar ukuran perusahaan mengakibatkan semakin tinggi usaha yang dilakukan manajer untuk dapat meningkatkan citra perusahaan dengan cara meningkatkan pengungkapan *Sustainability Reporting*”.

Menurut Suharti et al., (2024) dalam penelitian memberikan hasil bahwa :

“Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan dapat mempengaruhi seberapa banyak pengungkapan *Sustainability Report*. Perusahaan yang besar akan dianggap mempunyai banyak sumber daya dan kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial karena memiliki lebih banyak dana untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar”.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas ditemukan bahwa *corporate Size* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting*.

2.2.4 Good Corporate Governance Dapat Memoderasi Pengaruh Corporate

Environmental Performance Terhadap Sustainability Reporting

Kinerja lingkungan atau (*environmental performance*) mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengelola dampak ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya. Pengelolaan lingkungan yang efektif bukan hanya sekedar upaya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bagian dari strategi perusahaan untuk membangun reputasi dan menarik kepercayaan pemangku kepentingan. Namun efektivitas implementasi kinerja lingkungan sering bergantung pada kualitas tata kelola perusahaan. Perusahaan tidak hanya fokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. *Good corporate governance* yang baik memastikan bahwa program lingkungan tidak bersifat simbolis, melainkan

diintegrasikan kedalam strategi bisnis dan keputusan keuangan perusahaan (Hasan et al., 2025).

Menurut Aryanti et al., (2023) didalam penelitian menjelaskan bahwa :

“*Good corporate governance* memoderasi kinerja lingkungan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini membuktikan semakin tinggi tingkat *good corporate governance* dalam perusahaan, maka perusahaan akan cenderung melakukan pengungkapan yang lebih luas dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan pada pengungkapan kinerja lingkungan”.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditemukan bahwa *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *corporate environmental* terhadap *sustainability reporting*.

2.2.5 Good Corporate Governance Dapat Memoderasi Pengaruh *Intellectual*

Capital Terhadap Sustainability Reporting

Intellectual capital merupakan bentuk aset tidak berwujud yang mencerminkan kapabilitas perusahaan dalam menciptakan inovasi berwawasan lingkungan, membangun sistem internal yang mendukung keberlanjutan, serta menjalin hubungan yang berorientasi pada nilai lingkungan dengan pemangku kepentingan. Dalam konteks *Resource based theory*, *intellectual capital* diposisikan sebagai sumber daya strategis yang bernilai, langka, dan sulit ditiru, yang dapat menciptakan keunggulan berkelanjutan. Namun, efektivitas *intellectual capital* dalam mendorong keberlanjutan sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengelolanya dalam kerangka tata kelola yang baik. Disinilah peran *good corporate governance* menjadi penting. *Good*

corporate governance berfungsi sebagai sistem pengawasan dan pengarah yang menjamin bahwa pengelolaan *intellectual capital* dilakukan secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan tujuan strategi perusahaan (Hasan et al., 2025).

Menurut Walkomaroh et al., (2025) didalam penelitian memberikan hasil bahwa :

“*Good corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *green intellectual capital* terhadap *sustainability performance*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan pemanfaatan *intellectual capital* dalam mendukung keberlanjutan perusahaan”

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditemukan bahwa *good corporate governance* dapat memoderasi *intellectual capital* terhadap *sustainability reporting*.

2.2.6 Good Corporate Governance Dapat Memoderasi Pengaruh Corporate Size

Terhadap Sustainability Reporting

Merujuk pada teori legitimasi, *corporate size* diduga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. *Corporate size* sebagai salah satu karakteristik perusahaan yang turut menentukan tingkat kepercayaan investor, membutuhkan kredibilitas yang baik sehingga perusahaan perlu melakukan sumbangsih dalam pertumbuhan sosial dan lingkungan sekitar. Namun besarnya *corporate size* tidak selalu menjamin optimalnya pengungkapan *sustainability report*. Oleh karena itu, Pelaksanaan *good corporate* yang baik diduga memiliki kemungkinan yang besar untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan yang berupaya

untuk pemenuhan kebutuhan *stakeholders* serta berperan sebagai sistem yang mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Madona & Khafid, 2020).

Penelitian yang dilakukan Dewi et al (2025) menunjukkan bahwa :

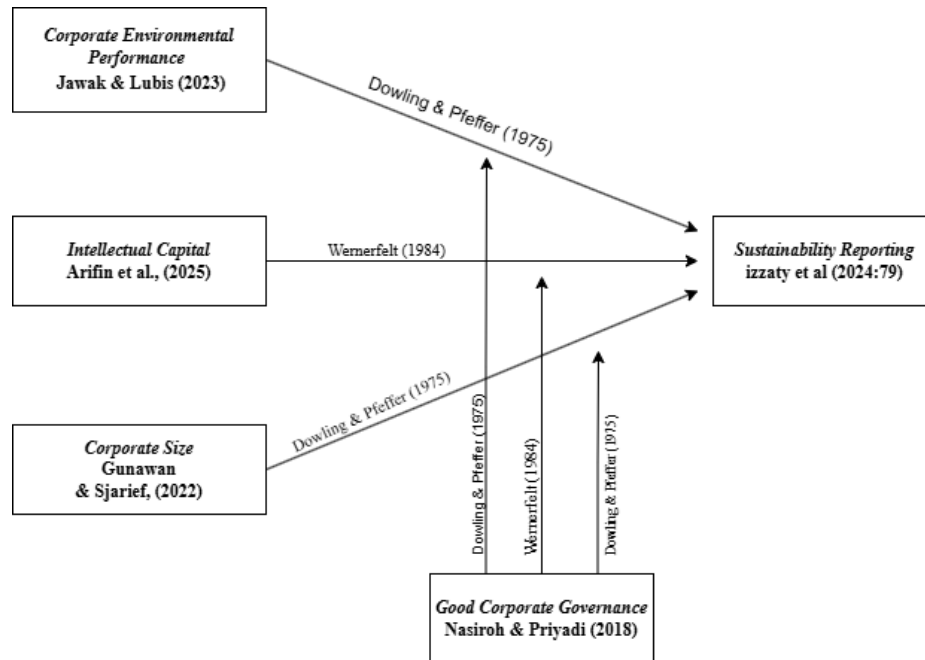
“*Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting*, serta ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan tersebut”.

Penelitian yang dilakukan Madona & Khafid (2020) menunjukkan bahwa :

“kombinasi *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan dapat memperkuat pengungkapan *Sustainability Report*”.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara *Corporate Size* dan *Good Corporate Governance* dalam mempengaruhi *Sustainability Reporting*. Oleh karena itu, *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *Corporate Size* terhadap *Sustainability Reporting*.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “pengaruh *Corporate Environmental Performance*, *Intellectual Capital*, dan *Corporate Size* terhadap *Sustainability Reporting* dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi”. Studi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024. Maka mode kerangka pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2023:99-100) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya. Penulis ingin mengasumsikan jawaban sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 : *Corporate Environmental Performance* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting*

Hipotesis 2 : *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting*

Hipotesis 3 : *Corporate Size* berpengaruh terhadap *Sustainability Reporting*

Hipotesis 4 : *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *Corporate Environmental Performance* terhadap *Sustainability Reporting*

Hipotesis 5 : *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *Intellectual Capital* terhadap *Sustainability Reporting*

Hipotesis 6 : *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *Corporate Size* terhadap *Sustainability Reporting*